



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 September 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 2 November 2021.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. TUJUAN

1. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, terutama terkait:
 1. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Balikpapan, di Baru Ulu, Kota Balikpapan;
 2. pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari oleh Kelompok Tani Wanita 28 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; serta
 3. progress Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Menyerap aspirasi para pemangku kepetingan di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dengan Tim Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 17-21 Desember 2021. Kunjungan Kerja dilakukan di Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Balikpapan di Baru Ulu, Kota Balikpapan; Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; serta dan

Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

B. GAMBARAN UMUM

1. Profil Kota Balikpapan

Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan, dengan total PDRB mencapai Rp79,65 triliun pada tahun 2016. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur (setelah Kota Samarinda) dengan total penduduk sebanyak 645.727 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 berjumlah 655.178 jiwa. Balikpapan merupakan gerbang utama menuju ibu kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman; keduanya merupakan yang tersibuk di Kalimantan.

Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit terutama berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai. Dengan kondisi tanah yang bersifat asam (gambut) serta dominan tanah merah yang kurang subur. Sebagaimana layaknya wilayah lain di Indonesia, kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar, memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan pelabuhan minyak.

Letak astronomis Balikpapan berada di antara 1,0 LS - 1,5 LS dan 116,5 BT - 117,5 BT dengan luas sekitar 503,3 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Sebelah timur berbatasan Selat Makassar;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66% dari luas

wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13% dari luas wilayah. Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Suhu udara di wilayah Kota Balikpapan berada pada 23°–32 °C dengan tingkat kelembapan relatif sebesar ±84%. Wilayah Kota Balikpapan sendiri beriklim tropis dengan tipe (Af). Curah hujan di wilayah Balikpapan cenderung tinggi setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 2.300–2.900 mm per tahun dan dengan jumlah hari hujan lebih dari 130 hari hujan per tahun.

2. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia masih saja terjadi, walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pencurian ikan yang bersifat lintas batas tidak semata-mata menjadi persoalan negara Indonesia saja, tetapi menjadi persoalan bersama antarnegara.

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika penanganya tidak serius oleh dunia internasional, mengingat dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime* dimana *transnational crime* itu sendiri dapat dilakukan oleh lebih dari satu negara dan kejahatannya berdampak serius pada negara lain.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menuntaskan masterplan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk:

- a. Menyiapkan agenda besar rencana kerja sistem pengawasan sumber daya kelautan perikanan dalam bentuk Roadmap yang terintegrasi.
- b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam rangka alokasi lahan untuk kantor dan dermaga kapal pengawasan yang lokasinya strategis dalam menjaga sumber daya kelautan perikanan di wilayah ibu kota negara baru.
- c. Mempersiapkan unsur-unsur perangkat dan fasilitas sarpras serta dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan status kelembagaan, dimana saat ini satuan PSDKP Balikpapan masih berstatus non eselon.
- d. Berkolaborasi dengan Pokmaswas di wilayah kerja dalam menjamin daya dukung sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari, berkelanjutan, dan optimal pemanfaatnya tanpa ada pemboman dan perusakan.
- e. Peran pegawai PSDKP menjadi pengayom dan pelindung berbagai kepentingan nelayan agar tercipta suasana yang kondusif.
- f. PSDKP tetap konsisten dalam menindak tegas bentuk pelanggaran kapal yang melakukan *IUU Fishing* selama ini, misalnya ada pemalsuan dokumen, *Mark Down*, mematikan VMS & AIS, *double flagging & registered*, tidak izin SLO & SPB, mengubah *call sign & mesin*, *transshipment* ilegal, serta berbagai jenis tindak pidana lain seperti perdagangan orang, perbudakan, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.

3. Pekarangan Pangan Lestari

Merebaknya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tidak hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi luas, seperti kelancaran distribusi pangan, terbatasnya akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan lainnya yang dapat mengganggu ketahanan pangan individu, keluarga, dan nasional.

Pada tahun 2020, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengubah Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dikembangkan sejak tahun 2010 menjadi Program Pekarangan Pangan Lestari (PPL) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan.

Selain pada lahan pekarangan, kegiatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah, dan lainnya.

P2L dikembangkan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bagi keluarga. Melalui P2L bisa dihasilkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, sekaligus untuk peningkatan pendapatan keluarga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, P2L dilakukan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, yaitu kegiatan budi daya berbagai jenis tanaman dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah, atau lahan kosong yang tidak produktif melalui pengembangan rumah bibit, demplot, pertanaman dan pascapanen serta pemasaran.

4. Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur

Upaya pemindahan Ibu Kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mendukung ide untuk membuat pusat politik

dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.

Alasan wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dijadikan lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah itu, lokasi yang "ada di tengah-tengah Indonesia", lokasi di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, "infrastruktur yang relatif lengkap", dan adanya 180 hektare tanah yang telah dikuasai Pemerintah.

Dalam pengumuman 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyebutkan Pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024. Kemudian, Pemimpin Ibukota Baru tidak dipimpin seorang Gubernur, melainkan Kepala Badan Otorita Ibukota Indonesia yang mirip jabatannya setingkat Menteri dan Badan Otorita pun akan dibantu oleh Manager-Kepegawaian mengawasi Pemerintahan Ibukota Baru nantinya.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Diskusi di Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Balikpapan di Baru Ulu, Kota Balikpapan

a. Pointer Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 1) Menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI atas dukungan politik yang sangat bagus untuk Ditjen PSDKP, agar terus meningkatkan kinerjanya dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan arahan untuk Ditjen PSDKP harus menjadi tangan kanan dan benteng KKP dalam mengawal seluruh kebijakan KKP.
- 3) Pelaksanaan tugas Ditjen PSDKP secara umum dalam mengawal kebijakan-kebijakan KKP dan secara khusus pelaksanaan

operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur.

- 4) KKP telah menetapkan program-program terobosan hingga tahun 2024 dalam rangka melaksanakan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, yakni:
 - a) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
 - b) Pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.
 - c) Pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.
- 5) Terobosan KKP diperkuat dengan peluncuran program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera oleh Presiden Joko Widodo, tanggal 23 Oktober 2021 dimana Program ekonomi biru mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan mengedepankan aspek ekologi, efisien, tanpa limbah, berkeadilan inklusif yang didukung oleh kesadaran publik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 6) Capaian kinerja Ditjen PSDKP selama tahun 2021, antara lain:
 - a) Berhasil melaksanakan pemberantasan *illegal fishing* dengan menangkap 167 kapal pelaku *illegal fishing*, serta memproses 96 pelaku *destructive fishing* dimana dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan sebanyak 96 pelaku *destructive fishing* telah diamankan.
 - b) Sejumlah upaya juga telah dilakukan dalam rangka pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan pencemaran perairan, kawasan konservasi dan ikan dilindungi, serta penyelesaian sengketa akibat kapal kandas di sejumlah wilayah perairan diantaranya Morowali, Raja Ampat, Banyuwangi, dan Nusa Penida.

- c) PSDKP menangani 212 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, yang sebagian besar masih dalam proses hukum.
- 7) Dalam rangka meningkatkan operasional pengawasan di lapangan, Ditjen PSDKP mengembangkan kelembagaan pengawasan melalui pembentukan UPT PSDKP. Tahun 2016, Kementerian PAN & RB menyetujui penambahan 9 UPT PSDKP, yang semula hanya 5 UPT, salah satu yang disetujui pembentukannya adalah Stasiun PSDKP Tarakan yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- 8) Meskipun hanya setingkat Eselon IV, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan selama 2021 terbilang cemerlang antara lain, menangkap 14 pelaku illegal fishing, bahkan pada 5 Desember 2021, berhasil menangkap 2 unit kapal ikan berbendera Malaysia. Selain itu, telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 9 ponton/rumpon dan 21 jaring/pukat trawl, pemusnahan ini tentunya bersama-sama Kejaksaan Negeri setempat. Capaian kinerja tersebut, tentunya tidak bisa lepas dari dukungan dari instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat (POKMASWAS).
- 9) Beberapa isu strategis pengawasan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur antara lain:
- a) Nelayan dengan alat tangkap cantrang yang masuk WPP NRI 713 rawan menimbulkan konflik.
 - b) Nelayan andon dari Sulawesi Tengah yang menangkap ikan di perairan Kalimantan Timur dan sampai sekarang belum dipayungi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - c) Implementasi Permen KP Nomor 17 Tahun 2021, khususnya pemanfaatan kepiting.
 - d) Penggunaan kabal/pipa bawah laut.
 - e) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Nasional Strategis Tertentu Pulau Maratua dan sekitarnya.
 - f) Rawannya pencemaran laut akibat tumpahan minyak (oil spill).
- 10) Operasional pengawasan SDKP di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan SDKP Balikpapan (non eselon), sangat jauh kalau dibandingkan dengan eselon I lain

(BKIPM). Untuk operasional di Kaltim ini dilaksanakan UPT setingkat Balai (selevel Eselon III).

b. Pointer G. Budisatrio Djiwandono selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Ke Kalimantan Timur.

- 1) Kunjungan Kerja Reses ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap program Pemerintah, antara lain:
 - a) Melihat secara langsung infrastruktur sarana dan prasarana Satwas PSDKP Balikpapan;
 - b) Mendengarkan penjelasan dan berdialog langsung terkait kinerja Satwas PSDKP Balikpapan dalam upaya penanggulangan dan penindakan *IUU Fishing*; serta
 - c) Menyerap aspirasi dari stakeholder dalam rangka penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia masih saja terjadi, walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pencurian ikan yang bersifat lintas batas tidak semata-mata menjadi persoalan negara Indonesia saja, tetapi menjadi persoalan bersama antarnegara.
- 3) *Illegal fishing* telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika penanganya tidak serius oleh dunia internasional, mengingat dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime* dimana *transnational crime* itu sendiri dapat dilakukan oleh lebih dari satu negara dan kejahatannya berdampak serius pada negara lain.
- 4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menuntaskan masterplan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong kepada Direktorat

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian kelautan dan perikanan untuk:

- a) Menyiapkan agenda besar rencana kerja sistem pengawasan sumber daya kelautan perikanan dalam bentuk Roadmap yang terintegrasi.
- b) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka alokasi lahan untuk kantor dan dermaga kapal pengawasan yang lokasinya strategis dalam menjaga sumber daya kelautan perikanan di wilayah Ibu kota Negara baru.
- c) Mempersiapkan unsur-unsur perangkat dan fasilitas sarpras serta dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan status kelembagaan, dimana saat ini satuan PSDKP Balikpapan masih berstatus non eselon.
- d) Berkolaborasi dengan Pokmaswas di wilayah kerja dalam menjamin daya dukung sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari, berkelanjutan dan optimal pemanfaatnya tanpa ada pemboman dan pengrusakan.
- e) Peran pegawai PSDKP menjadi pengayom dan pelindung berbagai kepentingan nelayan agar tercipta suasana yang kondusif.
- f) PSDKP tetap konsisten dalam menindak tegas bentuk pelanggaran kapal yang melakukan *IUU Fishing* selama ini, misalnya ada pemalsuan dokumen, *mark down*, mematikan VMS & AIS, *double flagging & registered*, tidak izin SLO & SPB, mengubah *call sign* & mesin, *transshipment* ilegal, serta berbagai jenis tindak pidana lain seperti perdagangan orang, perbudakan, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.

c. Aspirasi/Masukan Masyarakat

- 1) Terkait pertimbangan isu strategis bidang kelautan dan perikanan, mengingat luasnya perairan Kalimantan Timur, serta dihadapkan pada kebijakan nasional terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

ke Penajam Paser Utara, maka PSDKP memohon kepada Komisi IV DPR RI:

- a) Dukungan penguatan kelembagaan pengawasan Satwas PSDKP Balikpapan menjadi Pangkalan PSDKP (setingkat eselon III). Hal tersebut kami pikir tidak berlebihan, dengan mempertimbangkan kesetaraan juga dengan UPT di KKP dan juga satuan samping baik TNI maupun POLRI.
 - b) Dukungan pada pemerintah daerah (Gubernur dan Walikota) agar dapat mendukung upaya penguatan Ditjen PSDKP, khususnya Pemerintah Daerah Kaltim beserta Pemkab/Pemkot Balikpapan, terkait jika ada lahan yang tidak difungsikan, maka kiranya dapat dihibahkan kepada PSDKP untuk membangun Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan perikanan.
- 2) HNSI Penajam Paser Utara meminta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertimbangkan aturan kewenangan provinsi hingga 12 mil laut bagi nelayan penangkap ikan.
 - 3) HNSI Penajam Paser Utara dan Balikpapan meminta kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Penajam Paser Utara agar masyarakat dapat segera menyesuaikan diri dan menikmati dampaknya.
 - 4) Kelompok nelayan Balikpapan meminta Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk difasilitasi/diberi bantuan kapal penangkap ikan, mengingat saat ini para nelayan Balikpapan hanya mempunyai kapal pengangkut ikan saja.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, mengingat

jangkaun wilayah kerja dan tugasnya sangat berat melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.

- b. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Walikota) dalam rangka memohon hibah tanah untuk membangun Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan yang lebih besar.
- c. Komisi IV DPR RI mendukung penguatan kelembagaan pengawasan Satwas PSDKP Balikpapan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Pangkalan PSDKP setingkat eselon III dalam rangka penguatan dan persiapan pemindahan IKN.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan fasilitas pelatihan SDM dan alokasi bantuan kapal penangkap ikan kepada kelompok/koperasi di Balikpapan ataupun di Penajem Paser Utara.

2. Kunjungan ke Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Sepinggán Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

- a. Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau kebun bibit yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggán Raya, kelompok penerima manfaat program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Badan Ketahanan Pangan tahun 2021. Kegiatan dilanjutkan dengan panen bersama anggota KWT 28 Sepinggán Raya serta Pejabat intansi terkait yang mendampingi.
- b. **Catatan Hasil Diskusi:**
 - 1) Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggán Raya sudah menghasilkan beberapa kali panen dari beberapa jenis tanaman pangan, bahkan selada hasil panen dari kelompok ini sudah masuk dipasarkan ke pasar tradisional maupun pasar modern (supermarket) melalui pihak ketiga sehingga dapat menambah penghasilan anggotanya.
 - 2) Ke depan KWT 28 berharap dapat melakukan pengembangan usaha budi daya tanaman pangan dengan sistem hidroponik

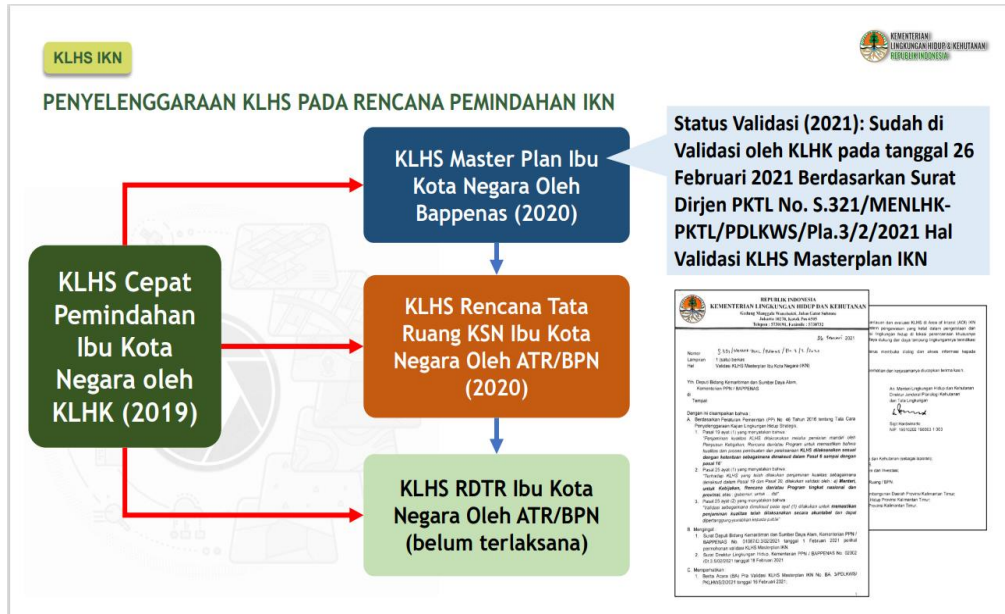
dengan, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas hasil panennya dan dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, disamping penanganan pascapanen dan pemasaran meningkatkan nilai tambah hasil produksi.

Rekomendasi:

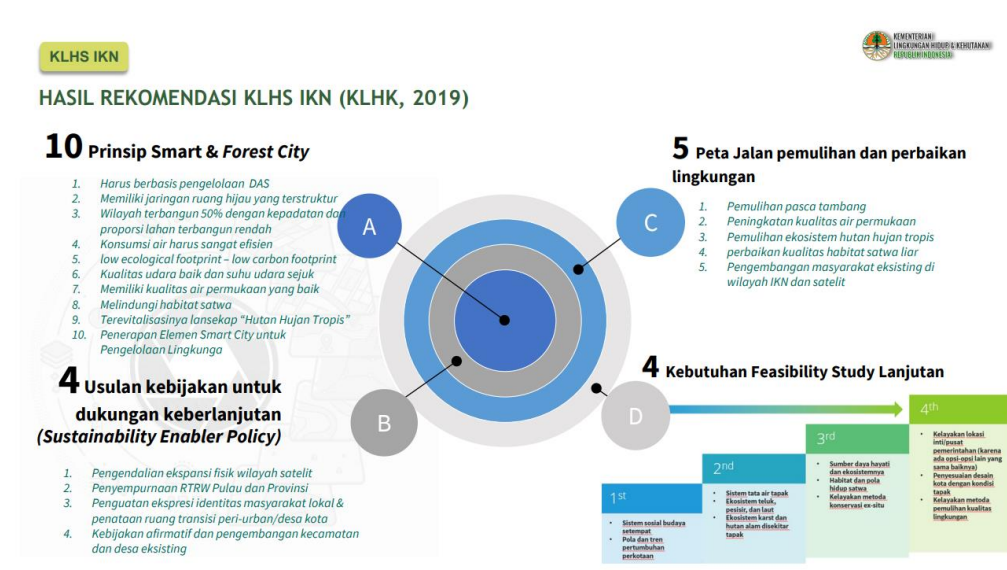
- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggang Raya, kelompok penerima manfaat program Badan Ketahanan Pangan tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong agar keberhasilan pelaksanaan program P2L oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggang Raya dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada kelompok penerima manfaat program P2L di tempat lain.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk lebih fokus serta memberikan prioritas dalam pelaksanaan dan pengembangan program Pekarangan Pangan Lestari, termasuk dan terutama dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani penerima manfaat, dalam rangka meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga, sekaligus untuk peningkatan pendapatan keluarga.

3. Diskusi di Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

- a. Proses perkembangan deliniasi calon areal Ibu Kota Negara masih berlangsung hingga saat ini, dengan komponen pembagian wilayah di dalamnya meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN), dan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN).
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara (IKN) yang telah dilaksanakan oleh instansi berwenang terkait adalah sebagai berikut:

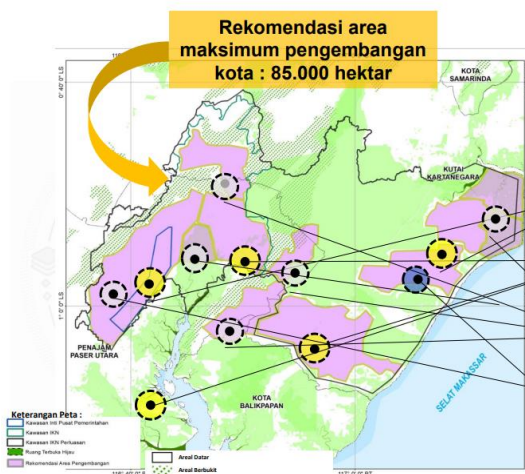


c. Hasil Rekomendasi dari KLHS IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:



d. Poin Penting Rekomendasi dari KLHS IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

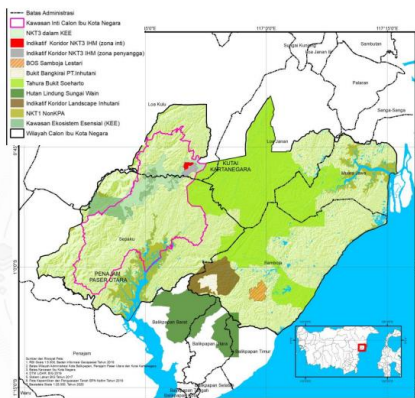
KLHS IKN POIN PENTING REKOMENDASI KLHS IKN (KLHK, 2019)



Salah satu rekomendasi KLHS IKN yang dilaksanakan KLHK (2019) adalah pemanfaatan sekitar 50% wilayah untuk dikembangkan, namun dengan kepadatan dan proporsi lahan terbangun rendah

- Ruang pengembangan kota dengan kriteria**
 - Penataan permukiman eksisting berbasis perencanaan peri-urban berkelanjutan (transisi desa kota)
 - Proporsi lahan terbangun rata-rata maksimal 50% dengan pemberian ruang pekarangan terbuka disetiap persil
- Ruang pengembangan terbatas yang berbau dengan ruang jelajah satwa, kondisi hutan produktif, memiliki areal NKT dengan kriteria :**
 - Proporsi lahan terbangun tidak lebih dari 30%
 - Dilengkapi infrastruktur yang ramah satwa
 - Dilengkapi lansekap yang mengurangi risiko konflik satwa dan manusia
- Ruang pengembangan dengan kriteria :**
 - Dilakukan pemulihan kualitas lingkungan
 - Penataan permukiman eksisting berbasis perencanaan transisi desa kota

KLHS IKN POIN PENTING REKOMENDASI KLHS IKN (KLHK, 2019)



Melindungi habitat satwa

Habitat dan daerah jelajah satwa liar kunci harus dijaga, dimana salah satunya adalah dengan ditetapkan sebagai ruang hijau primer.

- Pengelolaannya harus memperhatikan :
- Menghindari pembangunan dan pergerakan intensitas tinggi di ruang jelajah
 - Membangun infrastruktur yang meminimalkan dampak dan risiko bagi satwa maupun keselamatan masyarakat



Contoh kanopi tanaman diatas jalan raya sebagai sarana menyeberang orangutan



Contoh pemberian rambu penanda di sekitar wilayah jelajah yang berdekatan dengan ruang kegiatan masyarakat

KLHS IKN POIN PENTING REKOMENDASI KLHS IKN (KLHK, 2019)

Punya kualitasutupan lahan yang baik, dan terevitalisasinya lansekap "Hutan Hujan Tropis"



- e. Perlu penjelasan lebih detail mengenai gambaran serta kajian lingkungan hidup atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk mendukung program Pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan bersifat kritis berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilakukan, agar Presiden dapat mengambil keputusan tepat dan terbaik.
- f. Persemaian Modern Ibu Kota Negara
- 1) Tujuan pembangunan persemaian adalah untuk mendukung:
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penghijauan lingkungan, dan pemulihan daerah bencana.
 - b) Pengembangan jenis endemik dan tanaman unggulan lokal lainnya.
 - c) Pengembangan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi untuk masyarakat (HHBK).
 - 2) Lokasi Persemaian di Balai Pengelolaan Daerah Alirang Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau adalah:



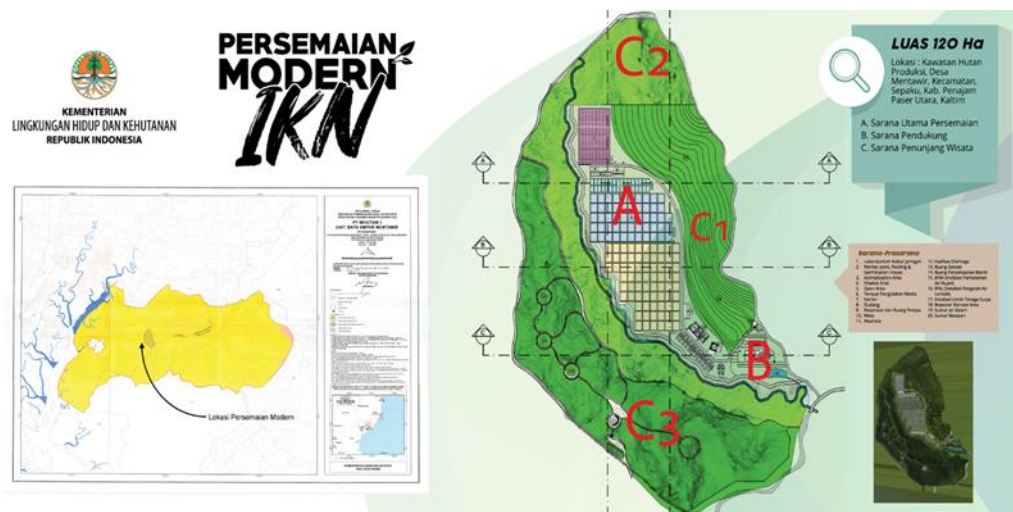
Lokasi Persemaian

No	LOKASI PERSEMAIAN	
1	Persemaian Modern IKN	- Alokasi Luas Kawasan Persemaian 120 Ha - Rencana luas sarana persemaian dan sarana pendukung 30 Ha - Lokasi : Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan, Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara
2	Persemaian Permanen Bukit Merdeka	- Luas 2 Ha - Lokasi : Jl. Ir. Soekarno - Hatta km 47 Balikpapan-Samarinda, Kel. Bukit Merdeka, Samboja, Kab. Kutai Kertanegara

- 3) Pembangunan Persemaian Modern Ibu Kota Negara:
 - a) Rencana pembangunan Persemaian Modern di IKN meliputi:
 - ✓ Sarana prasarana persemaian (*Germination-Rooting-Mother Plant House*; Laboratorium Kultur Jaringan;

Acclimatization Area; Shaded Area; Open Area; Pengolahan Media; Reservoir; IPAH; kantor; mess, dan lain-lain).

- ✓ Sarana pendukung persemaian meliputi Kebun Benih dan Arboretum (Koleksi tanaman endemik Indonesia),
 - ✓ Taman dan hutan kota.
- b) Luas areal persemaian 120 hektar, terdiri dari:
- ✓ Sarana persemaian seluas 30 hektar.
 - ✓ Sarana pendukung seluas 60 hektar.
 - ✓ Taman dan hutan kota 30 hektar.
- c) Kapasitas produksi bibit 15 juta bibit/tahun yang meliputi tanaman kayu, tanaman buah, tanaman eksotik/estetik dan tanaman hias.
- d) Produksi bibit dimanfaatkan untuk pemulihan lahan kritis, penanggulangan bencana alam, peningkatan ekonomi masyarakat (*green economy*), dan mendukung konsep IKN yang *green, smart, beautiful, dan sustainable*.



- 4) Konstruksi Tahap II Persemaian Modern Ibu Kota Negara:
- a) Sudah dilakukan pembangunan Tahap I berupa Gapura dan pagar keliling lokasi persemaian dengan dana DIPA tahun 2020.

- b) Pembangunan tahap II direncanakan dari dana non APBN sebagai bagian dari Barang Pengganti Tukar Menukar dengan Pertamina.
- c) Addendum Perjanjian antara Kementerian LHK dengan Pertamina telah ditanda tangani pada 9 November 2021 dengan nomor Nomor PKS.208/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/11/2021 dan Nomor SP-23/COOOOO/2021-SO sebagai dasar pendanaan untuk konstruksi tahap II Persemaian IKN.
- d) Pembangunan Tahap II direncanakan tahun 2022 berupa sarana utama persemaian. Saat ini dalam proses pembahasan dengan pihak Pertamina.



Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai gambaran serta kajian lingkungan hidup atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk mendukung program Pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser utara dan Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan agar dalam mendukung program Pembangunan Ibu Kota Negara tetap fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam

menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- c. Komisi IV DPR RI mendorong agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan bersifat kritis berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ibu Kota Negara yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar Presiden dapat mengambil keputusan tepat dan terbaik terkait rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan pembangunan Persemaian Modern Ibu Kota Negara seluas 120 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahaman Berau dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pemulihan ekosistem sebagai dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan serta akibat bencana, serta pemulihan ekosistem sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Negara.
- e. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam melaksanakan Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya berfokus kepada pembangunan areal seluas sekitar 250 ribu hektar di 2 (dua) kabupaten calon lokasi Ibu Kota Negara, yaitu Kabupaten Paser Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun juga berfokus kepada pembangunan di 7 (tujuh) kabupaten penyangga dan 3 (tiga) kota Penyangga di Provinsi Kalimantan Timur, terutama terkait kesiapan ketahanan dan kemandirian pangan.
- f. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendengarkan secara langsung penjelasan lebih detail mengenai rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dari sudut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu

menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

IV. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, mengingat jangkaun wilayah kerja dan tugasnya sangat berat melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Walikota) dalam rangka memohon hibah tanah untuk membangun Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan yang lebih besar.
- C. Komisi IV DPR RI mendukung penguatan kelembagaan pengawasan Satwas PSDKP Balikpapan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Pangkalan PSDKP setingkat eselon III dalam rangka penguatan dan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
- D. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan fasilitas pelatihan SDM dan alokasi bantuan kapal penangkap ikan kepada kelompok/koperasi di Balikpapan ataupun di Penajam Paser Utara.
- E. Komisi IV DPR RI mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggán Raya, kelompok penerima manfaat program Badan Ketahanan Pangan tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong agar keberhasilan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggán Raya dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada kelompok penerima manfaat Program Pekarangan Pangan Lestari lainnya.
- F. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai gambaran serta kajian lingkungan hidup atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk mendukung program Pembangunan Ibu Kota

Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur.

- G. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam mendukung program Pembangunan Ibu Kota Negara tetap fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- H. Komisi IV DPR RI mendorong agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan bersifat kritis berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ibu Kota Negara yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar Presiden dapat mengambil keputusan tepat dan terbaik terkait rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
- I. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan pembangunan Persemaian Modern Ibu Kota Negara seluas 120 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahaman Berau dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pemulihan ekosistem sebagai dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan akibat bencana, serta pemulihan ekosistem sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Negara.
- J. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam melaksanakan Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya berfokus kepada pembangunan areal seluas sekitar 250 ribu hektar di 2 (dua) kabupaten calon lokasi Ibu Kota Negara, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun juga berfokus kepada pembangunan di 7 (tujuh) kabupaten penyangga dan 3 (tiga) kota penyangga di Provinsi Kalimantan Timur, terutama terkait kesiapan ketahanan dan kemandirian pangan.
- K. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendengarkan secara langsung

penjelasan lebih detail mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dari sudut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

V. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Desember 2021

Ketua Tim,

Ttd.

G. Budisatrio Djiwandono

A-127

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36568/t/Komisi+IV+Tinjau+Sarana+Prasarana+PSDKP+Balikpapan>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36573/t/Budisatrio+Apresiasi+Program+Pekarangan+Pangan+Lestari+di+Sepinggang%2C+Balikpapan>

<http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/komisi-iv-dpr-ri-panen-sayur-p2l-di-kaltim>

<https://fakta.news/berita/budisatrio-apresiasi-program-pekarangan-pangan-lestari-di-sepinggan-balikpapan>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36604/t/Komisi+IV+Soroti+Dampak+Pembangunan+IKN+Terhadap+Lingkungan>

<https://www.antaraneews.com/berita/2597401/komisi-iv-dpr-minta-kesiapan-wilayah-kaltim-dituangkan-pada-ruu-ikn>

<https://www.beritatrans.com/artikel/218863/KKP-Perkuat-Kelembagaan-Pengawasan-di-Ibu-Kota-Negara-Baru/>

<https://kkp.go.id/artikel/36945-kkp-perkuat-kelembagaan-pengawasan-di-ibu-kota-negara-baru>

<https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1223277713/kkp-perkuat-kelembagaan-pengawasan-di-ibu-kota-negara-baru>

[https://wartaekonomi.co.id/read381... li-ibu-kota-negara-baru](https://wartaekonomi.co.id/read381...)

